



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**LAPORAN
MONITORING KINERJA
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SUMATERA SELATAN
S.D.
TRIWULAN I TAHUN 2016**

**NOMOR : LKIN – 193/PW07/1/2016
TANGGAL : 7 APRIL 2016**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jalan Bank Raya 2, Demang Lebar Daun, Palembang – 30128

Telepon (0711) 374985, 374986; Fax (0711) 374987

Website: www.bpkp.go.id e-mail: sumsel@bpkp.go.id

Nomor : LKIN-193/PW07/1/2016

7 April 2016

Hal : Laporan Monitoring Kinerja

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan

s.d. Triwulan I Tahun 2016

Yth.

Sekretaris Utama

u.p. Kepala Biro Perencanaan Pengawasan
di Jakarta

Berikut kami sampaikan hasil monitoring kinerja Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan s.d. Triwulan I Tahun 2016.

A. Simpulan

1. Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016 melaksanakan 2 program, yaitu program pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP.

Program pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP memiliki 15 indikator outcome dan program dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP memiliki 1 indikator outcome.

Dari 16 indikator outcome pada tahun 2016 tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan namun belum menargetkannya pada Triwulan I, sehingga capaian kinerja outcome belum dapat dilaporkan pada periode ini.

2. Realisasi *output* pengawasan sebanyak 39 rekomendasi atau 121,88% dari rencana sebanyak 32 rekomendasi. Capaian kinerja ini jika dibandingkan dengan rencana setahun adalah 19,50%.
3. Realisasi *output* pendukung pengawasan sebanyak 22 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau 104,76% dari rencana sebanyak 21 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Dibandingkan dengan rencana setahun tercapai 27,50%.

4. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan PKPT sebanyak 39 LHP atau 121,88% dari rencana sebanyak 32 LHP.
5. Realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan Non PKPT sebanyak 49 LHP atau 55,68% dari total realisasi LHP sebanyak 88 LHP.
6. Realisasi penugasan sesuai fokus pengawasan adalah sebagai berikut:
 - a. Pengawasan Program Prioritas Pembangunan Nasional : 12 PP
 - b. Peningkatan Ruang Fiskal : 1 PP
 - c. Pengamanan Aset : 19 PP
 - d. Perbaikan *Governance System* : 47 PP
7. Realisasi penugasan pengawasan PKPT sebanyak 79 PP atau 133,90% dari rencana sebanyak 59 PP.
8. Realisasi penugasan pengawasan Non PKPT sebanyak 153 PP atau 65,95% dari total realisasi penugasan pengawasan sebanyak 232 PP.
9. Realisasi penugasan pendukung pengawasan (PKAU) sebanyak 38 penugasan atau 84,44% dari rencana sebanyak 45 penugasan.
10. Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai sebanyak 82 OH atau 134,60% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.
11. Realisasi anggaran sebesar Rp6.766.565.655,00 atau 124,60% dari rencana sebesar Rp5.430.500.000,00.

B. Uraian Kegiatan

Rencana kegiatan tahunan (RKT) Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas rencana *output*, rencana penerbitan laporan, rencana penugasan, rencana penggunaan hari produktif, dan rencana penyerapan anggaran yang akan dihasilkan dari kegiatan pengawasan dan pendukung pengawasan.

1. Outcome

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2016 melaksanakan 2 program, yaitu program pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP dan program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP.

Program pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dan pembinaan penyelenggaraan SPIP memiliki 15 indikator outcome dan program

dukungan manajemen pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP memiliki 1 indikator outcome.

Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan memiliki 16 indikator outcome pada tahun 2016, namun belum menargetkannya pada Triwulan I, sehingga capaian kinerja outcome belum dapat dilaporkan pada periode ini.

2. Output

Sesuai Perjanjian Kinerja (Perkin) Tahun 2016, Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan merencanakan *output* sebanyak 200 rekomendasi dan 80 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Rencana *ouput* tahun 2016 berikut realisasinya s.d. triwulan I Tahun 2016 disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2.
Rencana dan Realisasi *Output* s.d. Triwulan I Tahun 2016

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana <i>Output</i> (Rek/Lap/Dok/Keg)		Realisasi <i>Output</i> s.d. Trw. ini	Capaian (%)	
		Tahun 2016	s.d. Trw. ini		Tahun 2016	s.d. Trw. ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/3)	(7=5/4)
1	Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP	125	20	27	21,60	135
2	Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP Nawacita	30	4	2	6,67	50
3	Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah Nawacita	4	1	0	0	0
4	Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP	37	5	10	27,03	200
5	Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda	4	2	0	0	0
6	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Perwakilan BPKP	80	21	22	27,50	104,76
7	Terlaksananya berat rumah negara Perwakilan BPKP	400	0	170	42,50	N/A

Dari Tabel 2 diketahui bahwa realisasi *output* pengawasan sebanyak 39 rekomendasi atau tercapai 121,88% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 32 rekomendasi. Hal ini disebabkan karena penugasan yang

direncanakan dimulai (RMP) setelah Triwulan I telah dilaksanakan di Triwulan ini. Indikator outcome rekomendasi pengawasan perwakilan BPKP nawacita baru tercapai 50 %, disebabkan penugasan pengawasan TPG guru di Kabupaten Lahat dan Prabumulih blm selesai, dikarenakan kurangnya SDM yang pada saat bersamaan sedang melaksanakan penugasan pengawasan Loan. Rekomendasi pengawasan regional bidang otonomi daerah nawacita dan rekomendasi pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemda belum tercapai karena masih menunggu kesiapan pemerintah daerah.

Sedangkan *output* pendukung pengawasan sebanyak 22 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan atau tercapai 104,76% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 21 laporan/dokumen/kegiatan/bulan layanan. Hal ini disebabkan adanya kegiatan di kepegawaian yang direncanakan di Triwulan II namun sudah direalisasikan di Triwulan I.

Jika dibandingkan dengan rencana *output* setahun, maka *output* pengawasan tercapai 19,50% dan *output* pendukung pengawasan tercapai 27,50%.

3. Fokus Pengawasan

Realisasi penugasan s.d. triwulan I Tahun 2016 sesuai fokus pengawasan disajikan dalam Tabel 3.

Tabel 3.
Rencana dan Realisasi Fokus Pengawasan s.d. Triwulan I Tahun 2016

No.	Bidang	Rencana PP		Realisasi PP
		Tahun 2016	s.d. Trw. ini	s.d. Trw. ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pengawasan Program Prioritas Pembangunan Nasional	55	9	12
2.	Peningkatan Ruang Fiskal	16	2	1
3.	Pengamanan Aset	40	19	19
4.	Perbaikan <i>Governance System</i>	89	29	47
	Jumlah	200	59	79

Dari Tabel 3 diketahui bahwa realisasi PP sesuai fokus pengawasan s.d. triwulan I tahun 2016 sudah sesuai dengan rencananya.

4. Penerbitan Laporan

Rencana penerbitan laporan hasil pengawasan (LHP PKPT) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. triwulan I tahun 2016 disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4.
Rencana dan Realisasi LHP PKPT s.d. Triwulan I Tahun 2016

No.	Bidang	Rencana LHP PKPT		Realisasi LHP PKPT s.d. Trw. Ini	Capaian (%)	
		Tahun 2016	s.d. Trw. Ini		Tahun 2016	s.d. Trw. Ini
1	2	3	4	5	6=5/3	7=5/4
1.	IPP	59	9	7	11,86%	77,78%
2.	APD	56	1	10	17,86%	1000,00%
3.	AN	37	0	6	16,22%	N/A
4.	INVESTIGASI	48	22	16	33,33%	72,73%
	Jumlah	200	32	39	19,50%	121,88%

Dari Tabel 4 diketahui bahwa realisasi penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. triwulan I tahun 2016 sebanyak 39 LHP atau tercapai 121,88% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 32 LHP.

Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penerbitan laporan hasil pengawasan s.d. triwulan I tahun 2016 tercapai 19,50%.

Hal ini disebabkan penugasan yang direncanakan dimulai (RMP) setelah Triwulan I telah dilaksanakan di Triwulan ini.

Di samping LHP PKPT di atas, Perwakilan juga menerbitkan LHP Non PKPT sebagaimana Tabel 5.

Tabel 5.
Realisasi Penerbitan LHP Non PKPT s.d. Triwulan I Tahun 2016

No.	Bidang	Realisasi LHP Non PKPT s.d. Triwulan ini	Total Realisasi LHP s.d. Triwulan ini	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	5=3/4
1.	IPP	28	35	80,00%
2.	APD	14	24	58,33%
3.	AN	6	12	50,00%
4.	INVESTIGASI	1	17	5,88%
	Jumlah	49	88	55,68%

Dari Tabel 5 diketahui bahwa realisasi penerbitan LHP Non PKPT s.d. triwulan I tahun 2016 mencapai 55,68% dari total realisasi penerbitan LHP pada periode yang sama.

5. Penugasan Pengawasan

Rencana Penugasan Pengawasan (PP) PKPT tahun 2016 berikut realisasinya s.d. triwulan I tahun 2016 disajikan dalam Tabel 6.

Tabel 6.
Rencana dan Realisasi PP PKPT s.d. Triwulan I tahun 2016

No.	Bidang	Rencana PP PKPT		Realisasi PP PKPT s.d. Trw. ini	Capaian (%)	
		Tahun 2016	s.d. Trw. ini		Tahun 2016	s.d. Trw. ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/3)	(7=5/4)
1.	IPP	59	26	30	50,85%	115,38%
2.	APD	56	10	16	28,57%	160,00%
3.	AN	37	2	12	32,43%	600,00%
4.	INVESTIGASI	48	21	21	43,75%	100,00%
	Jumlah	200	59	79	39,50%	133,90%

Dari Tabel 6 diketahui bahwa realisasi penugasan pengawasan s.d. triwulan I tahun 2016 sebanyak 79 PP atau tercapai 133,90% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 59 PP.

Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pengawasan s.d. triwulan I tahun 2016 tercapai 39,50%.

Hal ini disebabkan penugasan yang direncanakan dimulai (RMP) setelah Triwulan I telah dilaksanakan di Triwulan ini.

Di samping pelaksanaan PP PKPT di atas, Perwakilan juga melaksanakan PP yang tidak direncanakan (Non PKPT) sebagaimana Tabel 7.

Tabel 7.
Realisasi PP Non PKPT s.d. Triwulan I Tahun 2016

No.	Bidang	Realisasi PP Non PKPT s.d. Trw. ini	Total Realisasi PP s.d. Trw. ini	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=3/4)
1.	IPP	52	82	63,41%
2.	APD	80	96	83,33%
3.	AN	15	27	55,56%
4.	INVESTIGASI	6	27	22,22%
	Jumlah	153	232	65,95%

Dari Tabel 7 diketahui bahwa realisasi PP Non PKPT s.d. triwulan I tahun 2016 mencapai 65,95% dari total realisasi PP pada periode yang sama.

6. Penugasan Pendukung Pengawasan

Rencana penugasan pendukung pengawasan (PKAU) tahun 2016 berikut realisasinya s.d. triwulan I tahun 2016 disajikan dalam Tabel 8.

Tabel 8.
Rencana dan Realisasi PKAU s.d. Triwulan I Tahun 2016

No.	Bagian/Bidang	Rencana Penugasan		Realisasi Penugasan s.d. Trw. ini	Capaian (%)	
		Tahun 2016	s.d. Trw. ini		Tahun 2016	s.d. Trw. ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/3)	(7=5/4)
1.	TU	132	45	38	28,79%	84,44%
	Jumlah	132	45	38	28,79%	84,44%

Dari Tabel 8 diketahui bahwa realisasi penugasan pendukung pengawasan s.d. triwulan I tahun 2016 sebanyak 38 penugasan atau tercapai 84,44% dari rencana pada periode yang sama sebanyak 45 penugasan.

Hal ini disebabkan adanya kegiatan yang sudah dilaksanakan namun tidak didukung dengan surat tugas.

Jika dibandingkan dengan rencana setahun, maka penugasan pendukung pengawasan tersebut tercapai 28,79%.

7. Penggunaan Hari Produktif

Jumlah pegawai sampai dengan triwulan I tahun 2016 pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 122 orang terdiri dari 92 PFA dan 30 PFU. Potensi hari produktif tahun 2016 berikut realisasi penggunaannya s.d. triwulan I tahun 2016 disajikan dalam Tabel 9.

Tabel 9.
Potensi dan Realisasi Hari Produktif s.d. Triwulan I Tahun 2016

No.	PFA/PFU	Potensi OH (HP/HK)		Realisasi OH s.d. Trw. ini	Capaian (%)	
		Tahun 2016	s.d. Trw. ini		Tahun 2016	s.d. Trw. ini
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=5/3)	(7=5/4)
1.	PFA (HP)	21.804	5.451	7.003	32,12%	128,47%
2.	PFU (HK)	7.110	1.778	2.957	41,59%	166,36%
	Jumlah	28.914	7.229	9.960	34,45%	137,79%

Dari Tabel 8 diketahui bahwa realisasi penggunaan OH s.d. triwulan I tahun 2016 sebanyak 9.960 OH atau tercapai 137,79% dari potensi pada periode yang sama sebanyak 7.229 OH.

Jika dibandingkan dengan potensi hari produktif setahun, maka realisasi penggunaan hari produktif s.d. triwulan I 2016 tercapai 34,45%.

Realisasi penggunaan hari produktif per pegawai s.d. triwulan I tahun 2016 sebanyak (*Jumlah kolom 5/Jumlah Pegawai s.d. bulan ini*) 82 OH atau 34,60% dari potensi setahun sebanyak 237 OH.

Hal ini disebabkan karena penugasan yang direncanakan dimulai setelah Triwulan I telah dilaksanakan di Triwulan ini serta adanya penugasan non PKPT.

8. Penyerapan Anggaran

Anggaran Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 sebesar Rp33.164.748.000,00. Rencana penyerapan anggaran tahun 2016 berikut realisasinya s.d. triwulan I tahun 2016 disajikan dalam Tabel 10.

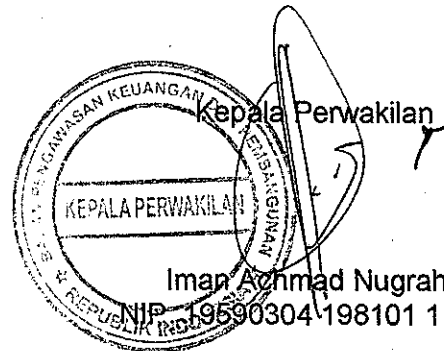
Tabel 10.
Penyerapan Anggaran s.d. Triwulan I 2016

Program	Kegiatan	IKK	Jumlah Kumulatif			% Capaian Penyerapan	
			Anggaran (Rp)	Rencana Penyerapan (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Terhadap Anggaran	Terhadap Rencana Penyerapan
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8=6/5
Dukungan Manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BPKP	Pembinaan administrasi dan pengelolaan perlengkapan serta pembayaran gaji/tunjangan BPKP Fasilitasi dukungan manajemen perwakilan BPKP Pengadaan sarana dan prasarana BPKP		27.275.073.000	5.010.000.000	5.391.209.564	19,77%	107,61%
			845.373.000	145.500.000	148.285.622	17,54%	101,91%
			600.000.000	-	255.544.000	42,59%	N/A
Program Pengawasan Intern	Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP	2.680.512.000	135.000.000	776.284.719	28,96%	575,03%
Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembinaan Penyelenggaraan SPIP		Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting)	844.896.000	-	-	0,00%	N/A
		Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita)	717.806.000	115.000.000	195.241.750	27,20%	169,78%
		Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah (Nawa Cita)	104.240.000	-	-	0,00%	N/A
		Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda (Termasuk Bimtek APIP Pemda)	96.848.000	25.000.000	-	0,00%	0,00%
	Jumlah		33.164.748.000	5.430.500.000	6.766.565.655	20,40%	124,60%

Dari Tabel 10 diketahui bahwa realisasi anggaran s.d. triwulan I tahun 2016 sebesar Rp6.766.565.655,00 atau terserap 124,60% dari rencana pada periode yang sama sebesar Rp5.430.500.000,00.

Jika dibandingkan dengan rencana penyerapan anggaran setahun, maka penyerapan anggaran tersebut sebesar 20,40%.

Demikian hasil monitoring kinerja triwulan I tahun 2016 ini kami sampaikan. Atas perhatian dan perkenan Sekretaris Utama, kami ucapkan terima kasih.


Kepala Perwakilan
Iman Achmad Nugraha
NIP. 195903041981011001

Tembusan Yth.:

Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman, selaku Deputi Pembina.